

ABSTRAK

Nama : Febiyanti Sukardi
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul : Kesesuaian Keberadaan Kawasan Sektor Pertahanan di Kota Tangerang Selatan
Dosen Pembimbing : Ir. Anthony P. Nasution, MURP. dan Dr. Ir. Ugay Sugarmansyah, M.S. IPM.

Berbagai kebijakan pembangunan tingkat pusat dan daerah yang berjalan sampai saat ini, belum ada sinkronisasi yang integral dengan konsep penataan wilayah pertahanan. Maka dari itu, penelitian kali ini dilakukan pada lokasi studi Kota Tangerang Selatan yang terkenal dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi besar 8.361 jiwa/km² (BPS Provinsi Banten Tahun 2022), tidak adanya lahan dengan fungsi peruntukan latihan militer, dan sektor pertahanan yang berdampingan dengan kawasan industri. Dengan terjadinya permasalahan dan kondisi eksisting tersebut, perlu juga diperhatikan dampaknya pada sektor pertahanan seperti kelayakan fungsi kawasan militer di tengah-tengah perkotaan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan zona pertahanan. Mendukung fungsi kawasan militer, tujuan dari penelitian kali ini adalah mengidentifikasi kesesuaian keberadaan kawasan pertahanan terhadap struktur ruang dan rencana pola ruang eksisting. Selanjutnya perlu diberikan upaya untuk mengoptimalkan kondisi yang ada supaya meminimalisir ketidaksesuaian antara kebijakan pertahanan dengan kebijakan penataan ruang dan kondisi eksisting. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji standar/pedoman yang telah ditetapkan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kondisi eksisting, analisis kesesuaian rencana pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting, dan analisis implikasi keselarasan kebijakan PP No. 68 Tahun 2014, Buku Pedoman Kementerian Pertahanan, dan RTRW Kota Tangerang Selatan dengan Pola Ruang Pertahanan. Hasil yang didapat dari analisis bahwa kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan pola ruang yang tercantum di dalam RTRW Kota Tangerang Selatan yaitu seluas 41,93 Ha. Secara keseluruhan pola ruang di sekitar sektor pertahanan untuk klasifikasi sesuai memiliki persentase 88.06%, klasifikasi belum sesuai memiliki persentase 10.87%, dan untuk klasifikasi tidak sesuai memiliki persentase sebesar 7.75%. Beberapa kegiatan ketidaksesuaian dengan konsep tata ruang sektor pertahanan, yaitu terdapat kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan pertahanan, terdapat rumah/warung dengan waktu operasional kegiatan melebihi batas waktu pada tabel ITBX (Izin, Terbatas, Bersyarat, Tidak Diperbolehkan); terdapat perdagangan eceran bahan bakar minyak; terdapat kawasan industri dan beberapa sektor pertahanan masih menggunakan saluran listrik yang tergabung dengan masyarakat. Arahan pola ruang menurut kebijakan bahwa kawasan untuk daerah sekitar pangkalan militer harus pertanian, perkebunan, atau perikanan.

Kata Kunci: Kawasan Pertahanan, Kesesuaian, Pola Ruang, Struktur Ruang.

ABSTRACT

Various development policies at the central and regional levels that have been implemented so far, there has been no integral synchronization with the concept of structuring the defense area. Therefore, this research was conducted at the study location, South Tangerang City, which is known for its relatively high population density, 8,361 people/km² (BPS Province of Banten, 2022). there is no land with the function of designating military training, and the defense sector adjoining industrial areas. With these problems and existing conditions, it is also necessary to pay attention to their impact on the defense sector, such as the proper functioning of military areas in the midst of cities and the use of space around the defense zone area. Supporting the function of the military area, the purpose of this research is to identify the compatibility of the existence of the defense sector area with the existing spatial structure and spatial pattern plan. Furthermore, efforts need to be made to optimize existing conditions in order to minimize discrepancies between defense policies and spatial planning policies and existing conditions. This research method uses a quantitative approach with the aim of testing established standards/guidelines. The analyzes carried out include analysis of existing conditions, analysis of suitability of spatial pattern plans with existing land use, and analysis of the implications of policy alignment PP No. 68 of 2014, Ministry of Defense Handbook, and RTRW of South Tangerang City with a Defense Space Pattern. The results obtained from the analysis show that there is a defense sector area in South Tangerang City according to the spatial pattern listed in the South Tangerang City Spatial Planning, which is 41.93 Ha in area. Overall the spatial pattern around the defense sector for appropriate classification has a percentage of 88.06%, unsuitable classification has a percentage of 10.87%, and for unsuitable classification has a percentage of 7.75%. Some of the activities are inconsistent with the concept of spatial planning for the defense sector, namely there are cultivation areas built around the defense area, there are houses/shops with operational hours exceeding the time limit in the (Permission, Limited, Conditional, Not Allowed) ITBX table; there is a retail trade of fuel oil; there are industrial areas and several defense sectors that still use power lines that are affiliated with the community. The direction of the spatial pattern is according to the policy that the area for the area around the military base must be agriculture, plantation or fishery.

Keywords: *Defense Area, Suitability, Spatial Pattern, Spatial Structure.*